

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pendidikan adalah hal yang seharusnya didapatkan oleh semua warga negara, tidak terkecuali anak-anak. Hal ini juga telah diabadikan dalam beberapa Deklarasi Internasional, salah satunya yakni pada 1948, di mana Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DU-HAM) resmi diselenggarakan. Selain itu dalam Konvensi Hak Anak atau yang biasa disebut juga dengan *International Convention on the Right of Children* (CRC), pembahasan mengenai hak pendidikan untuk anak juga menjadi poin penting. Ada lagi melalui berbagai macam bentuk perjanjian yang fokus pada pernyataan pentingnya hak pendidikan untuk anak yang menyangkut disabilitas, pendidikan bagi anak perempuan, pendidikan untuk rasa tau kelompok minoritas, dan pendidikan bagi anak-anak pekerja migran.¹

Namun, pada kenyataannya, ada berbagai masalah pendidikan yang belum tuntas, seperti halnya hak dasar anak dalam mendapatkan pendidikan. Kualitas pendidikan di Indonesia yang digadang-gadang bisa merata untuk seluruh generasi, dalam realisasinya hanya bisa didapatkan oleh segelintir kalangan. Tidak semua anak bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak dan anak-anak di daerah terpencil harus rela tersisih dari sistem pendidikan yang diterapkan tersebut.

Diskriminasi dengan aneka bentuknya masih membayangi anak-anak dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Kaitannya dengan hal tersebut, Komite Hak Anak di PBB juga telah menyebutkan, setidaknya ada 50 aspek yang dijadikan alasan adanya diskriminasi pada anak.² Padahal tujuan hadirnya pendidikan merupakan ruang bagi manusia

¹ Lihat: Konvensi PBB mengenai Hak bagi Penyandang Disabilitas (2006), Pasal 24, Pasal 10, Pasal 5, dan Pasal 30.

² Lihat: CRIN Guide to Non- Discrimination and the CRC pada "https://www.crin.org/docs/CRC_Guide.pdf .

untuk mendapatkan pengakuan sebagai subjek budaya, sehingga pendidikan dimaksudkan dapat memerdekakan manusia ditinjau dari aspek pengetahuan, ekonomi, teknologi dan aspek-aspek kemanusiaan.

Di Indonesia, pendidikan juga dimaksudkan sebagai sarana untuk mengembangkan sumber daya manusia. Mengingat identitas masyarakat telah didefinisikan di dalam proklamasi kemerdekaan. Hal ini juga sudah diuraikan dalam Pembukaan UUD 1945, mengenai penjabaran dari tujuan diadakannya pendidikan nasional. Dan karena Pancasila merupakan ideologi dan pedoman hidup bangsa Indonesia yang mendasari tujuan luhur, maka pendidikan nasional juga dikatakan sebagai usaha untuk mendidik manusia Pancasila.³

Terkait sistem pendidikan nasional, UU No. 20 tahun 2003, disebutkan tujuan pentingnya pendidikan nasional. Pendidikan nasional mengemban tujuan sebagai ruang untuk mencerdaskan, membentuk karakter bangsa yang beradab, mengembangkan potensi, menjadikan manusia yang bermoral dan memiliki akhlak mulia, kreatif, sehat, mandiri, memiliki ilmu, menjunjung tinggi demokrasi dan mampu menjadi pribadi yang bertanggungjawab.⁴

Sebagaimana yang dipaparkan di atas, dalam mendasari tujuan dan cita-cita pendidikan nasional, maka pendidikan sebagai media tentu menjadi aspek penting dalam rangka meningkatkan mutu peserta didik, baik dari segi kecerdasan maupun karakter kepribadiannya. Maka untuk dapat menghasilkan generasi sebagaimana yang diharapkan, pendidikan terus mengalami perkembangan dan pembangunan sistem untuk menyesuaikan tujuan pembangunan nasional.

Hal di atas kiranya juga mengacu pada definisi yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara soal pendidikan. bahwa yang dimaksud dengan pendidikan merupakan falsafah hidup manusia, pendidikan dapat menuntun anak-anak dengan segenap kekuatan yang dimilikinya untuk bisa menjadi manusia, sebagai anggota masyarakat yang bisa menyebarkan kebahagiaan dan keselamatan.⁵ Sehingga merupakan kewajiban negara mengambil perannya dalam dunia pendidikan untuk membangun dan mengembangkan pendidikan secara berkelanjutan

3 Rasjidi. Strategi Kebudayaan dan Pembaharuan Pendidikan Nasional. (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1980), hlm. 90.

4 Lihat: Undang-Undang .No.20 tahun 2003 Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang. No.14 tahun 2005 tentang Guru & Dosen.

5 Ki Hajar Dewantara. Dasar-dasar Pendidikan. (Majelis Luhur Taman siswa: Jogjakarta, 1938), hlm. 20.

agar manusia mencapai keselamatan maupun kebahagiaan. Maka, kedudukan pendidikan di sini tentu sangat penting bagi kehidupan manusia.

Ketika pendidikan menjadi hak asasi bagi seluruh warga negaranya, maka hal tersebut tidak bisa dikecualikan untuk kelompok-kelompok tertentu, seperti anak-anak penyandang disabilitas atau anak-anak dengan kebutuhan khusus. Pada dasarnya semua manusia di hadapan Allah itu sama, sehingga dalam kehidupan bermasyarakat, tidak ada perbedaan dalam hal mendapatkan pendidikan. Hadirnya pendidikan juga menjadi upaya dasar dalam merombak kehidupan agar lebih kondusif, dan menciptakan kesempatan baru bagi anak-anak untuk bisa mengakses pendidikan, utamanya bagi anak-anak yang berpotensi dalam pengembangan keahlian atau pengembangan bakat-bakat tertentu sehingga menjadikan mereka anak-anak yang berkembang dan maju. Hal ini mengacu pasal 31: 1, UUD 1945 mengenai pendidikan inklusi.⁶

Sayangnya, anak-anak difabel cenderung memiliki nasib yang kurang beruntung dalam proses pendidikan. Prasangka dan persepsi sosial yang diarahkan pada anak-anak ini membuat mental orangtua dan anak terpuruk, sehingga membuat anak-anak tersebut tidak mendapat pendidikan yang seharusnya. Sementara pemisahan anak berkebutuhan khusus secara terus menerus, justru akan melahirkan jurang diskriminasi pada anak di tengah masyarakat. Padahal, diskriminasi memengaruhi tumbuh kembang anak secara menyeluruh, membuatnya kehilangan ruang partisipasi dan takut mengambil kesempatan untuk pengembangan diri. Sehingga, jika sebelumnya pendidikan inklusi tidak tersedia, maka belum terlambat untuk mengambil peran dan merombak sistem yang ada agar menjadi lebih baik. Pendidikan inklusi harus dihadirkan bagi mereka yang tidak memiliki kemerdekaan belajar dan mendapatkan pendidikan.⁷

Sekolah inklusi merupakan sebutan untuk sekolah reguler yang dalam program pembelajarannya menyelenggarakan atau menyediakan pelayanan pendidikan berbasis inklusi. Menurut Olsen, sekolah inklusi bisa mengakomodasi seluruh peserta didik, tidak peduli latar belakang keluarga, perbedaan ras, perbedaan kondisi fisik, emosional, bahasa

6 Lihat: Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik berkebutuhan khusus dan memiliki bakat istimewa.

7 Inclusive Education Working Group, (London: St Vincent House, 2016), hlm. 30.

maupun perbedaan keadaan sosial. Dari penjabaran itu dapat ditarik pemahaman bahwa anak-anak difabel memiliki kesempatan mendapatkan ruang belajar yang sama.⁸ Di sini pemerintah tentu mempunyai kewajiban dan tanggungjawab untuk memenuhi hak setiap anak yang memiliki kebutuhan khusus, misalkan tunanetra, tunarungu, tunadaksa dan lain sebagainya, dalam memiliki lingkungan belajar yang layak seperti halnya anak-anak lainnya.⁹ Mengacu pada bab II, Pasal 4: 1, UU No.20/2003 tentang pelaksanaan pendidikan nasional, maka pendidikan harus dilaksanakan sebagaimana isi undang-undang tersebut, yakni demokratis serta berkeadilan. Pendidikan juga harus jauh dari diskriminasi, mengingat dalam pendidikan hak asasi manusia menjadi aspek yang dijunjung tinggi.

Dalam pasal tersebut, kita mendapati pemahaman terkait anak-anak berkebutuhan khusus baik rohani maupun jasmani yang dikenal dengan sebutan difabel. Sementara menurut pandangan Islam, agama telah hadir untuk memberikan perhatian kepada anak-anak yang menyandang difabel. Salah satunya seperti yang termaktub dalam QS. 'Abasa, yang dalam pemahamannya berbicara tentang pendidikan untuk semua kalangan.

عَبَسَ وَتَوَلَّى (1) أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى (2) وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهٗ يَزَكَّى (3) أَوْ يَذَّكَّرُ
فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى (4) (ع. بس: 1-4)

Artinya: 1) Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling. 2) karena datang seorang buta kepadanya. 3) tahukah kamu barangkali dia ingin membersihkan dirinya (dari dosa). 4) atau dia (ingin) mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberi manfaat kepadanya. (QS. 'Abasa: 1-4)¹⁰

Meskipun anak-anak difabel adalah anak-anak yang berbeda, namun perlakuan yang berbeda (diskriminatif) dilarang. Selama ini sistem yang dibangun melalui Sekolah Luar Biasa (SLB) telah memperpanjang jarak kesenjangan bagi peserta didik yang menyandang disabilitas. Sekolah tersebut semacam benteng yang mengokohkan adanya eksklusivisme, yang justru membuat anak terhambat dalam

8 Olsen. Pendidikan untuk Semua. (Lombok: Depdiknas, 2002), hlm. 3.

9 Solichin A.W. Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. (Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 1997).hlm. 56

10 Q.S.Abbasa :1-4

pembelajarannya. Namun, akan berbeda cerita apabila dalam pendidikan reguler diintegrasikan dengan sistem yang inklusif, maka bisa membuka ruang yang pada awalnya eksklusif, menjadi ruang yang lebih terbuka dan mampu memberi kesempatan pada peserta didik penyandang disabilitas untuk bersekolah tanpa sekat-sekat perbedaan.¹¹

Sebenarnya pada sebuah Lokakarya yang diadakan di Bandung, 8-14 Agustus 2004 silam, kesepakatan mengenai program pendidikan yang didasarkan pada tujuan kehidupan yang inklusif bagi anak berkebutuhan khusus (ABK), telah dilaksanakan dan ditetapkan. Hal ini sekaligus menjadi bukti bahwa pendidikan untuk ABK mulai serius diperhatikan oleh pemerintah. Hadirnya kesepakatan tersebut dilatarbelakangi dari kesadaran bahwa anak-anak difabel juga memiliki eksistensi dan berhak menerima kesempatan yang sama, baik dalam hal berbicara, memperoleh pendidikan, kesejahteraan, berpendapat dan memperoleh fasilitas kesehatan.¹²

Secara umum regulasi terkait kewajiban dan hak-hak anak yang berkebutuhan khusus adalah hak dan kewajiban yang diperuntukan untuk warga Negara. Hal tersebut bisa disaksikan pada isi deklarasi HAM secara universal pada tahun 1948. Kemudian isi deklarasi tersebut tahun 1989 dimunculkan kembali dengan lebih gamblang dalam Konvensi Hak Anak. Selain itu ada Pernyataan Salamanca dan Kerangka Aksi dari UNESCO pada 1994. Ditambah Deklarasi Dunia menyangkut Pendidikan untuk Semua yang terbit pada 1990, kemudian pada 1993 terdapat Standar Peraturan dari PBB mengenai Persamaan Kesempatan untuk Penyandang Cacat, di tahun 1997 ada Undang-undang Penyandang Kecacatan, Kerangka Aksi Dasar juga disahkan tiga tahun kemudian, yakni pada 2000. Pada 2003 aturan tersebut juga dipertegas dalam UU RI Nomor 20 yang kemudian melatarbelakangi lahirnya Deklarasi Kongres Anak Internasional setahun setelahnya.¹³

Keberadaan sistem regulasi tersebut setidaknya telah menjadi jaminan anak-anak difabel untuk mendapatkan pendidikan dengan kualitas yang sama dengan anak-anak normal pada umumnya. Hingga saat ini, perjuangan untuk bisa memberikan para ABK hak-hak dasarnya dalam memperoleh pendidikan terus didengungkan. Agenda utama dari

11 Handbook Pendidikan Inklusif: Workshop Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus, Solo: Fakultas Psikologi UMS dan Dit. PSLB Depdiknas.

12 Satmoko, Sekolah Alternatif, Mengapa Tidak? (Jogjakarta: Diva Press, 2010), hlm. 132.

13 Ibid.

perjuangan tersebut adalah tercapainya pendidikan berbasis inklusi di seluruh sekolah di Indonesia. Hal tersebut tentunya membutuhkan dukungan dari pemerintah, lembaga-lembaga terkait di bidang pendidikan dan juga masyarakat untuk mendukung pemenuhan hak yang sama bagi ABK, agar anak-anak tersebut juga dapat menjadi tonggak penerus bangsa.¹⁴

UU No. 4 tahun 1997 juga menjamin keberadaan anak-anak difabel. Mulai dari jenjang karir, kemampuannya meliputi bakat atau potensi dan minat yang dimilikinya tanpa ada sedikitpun diskriminasi. Dengan begitu, seharusnya tidak ada sekat yang membedakan antara penyandang cacat dengan yang lain, dalam hal pendidikan. Kemudian dijelaskan pada pasal 12 bahwa lembaga pendidikan memiliki kewajiban untuk menerima peserta didik, termasuk ABK untuk menjadi siswa di lembaganya. Adanya sekolah inklusi diharapkan juga bisa mengukuhkan persamarataan peluang untuk anak-anak penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus.¹⁵

Ini artinya, sekolah juga sudah harus bisa mengakomodasi peserta didik secara keseluruhan dan tidak membeda-bedakan latar belakang fisik dan sosial, bahasa dan lain sebagainya. Sehingga kehadiran pendidikan inklusi dapat mewadahi serta memenuhi pendidikan yang lebih beradap dan berkualitas pada anak-anak difabel tanpa merasa dibeda-bedakan. Mereka dapat hidup dan belajar berdampingan dengan anak-anak lainnya tanpa merasa minder. Dengan model pendidikan ini, diharapkan peserta didik yang berkebutuhan khusus bisa mengembangkan potensi yang dimilikinya bersama dengan teman-teman sebayanya dengan lebih optimal. Hal ini sekaligus untuk mengingatkan masyarakat bahwa semua anak adalah sama.¹⁶

Hal ini sesuai dengan Permendiknas, bahwa pendidikan merupakan sistem pendidikan yang menempatkan persamaan antara anak-anak difabel dengan anak normal dalam mendapatkan lingkungan belajar yang baik dan berkualitas.¹⁷ Tetapi konsekuensi tetap muncul dari adanya pelaksanaan sistem pendidikan ini, yakni menuntut pihak

14 Satmoko Budi, *Sekolah Alternatif, Mengapa Tidak?...* hlm. 133

15 Ibid.,. hlm. 136

16 Tuti Nurhayati, *Cara Cerdas Menangani ABK*, (Surabaya: Media Guru, 2017), hlm.13.

17 Lihat: Permendiknas (pasal 1) Nomor 70 tahun 2009.

sekolah melakukan berbagai perubahan, yang mengacu pada persamaan hak peserta didik tanpa adanya diskriminasi.¹⁸

Sebelum melahirkan sistem yang berbasis inklusi, pengembangan kurikulum inklusi diperlukan sebagai landasan pelaksanaan pembelajaran. Kurikulum sendiri adalah komponen penting yang memiliki peran strategis dalam menciptakan tujuan sekolah yang bermutu tinggi atau berkualitas.¹⁹ Dalam pasal 1: 19 Undang-undang No.20/2003 disebutkan mengenai pengertian dari kurikulum, yakni sebuah perangkat berupa rencana-rencana dan tata aturan yang berkaitan dengan tujuan sebuah pembelajaran, materi atau isi, bahan ajar dan serangkaian pedoman untuk menyelenggarakan proses pembelajaran dalam sebuah institusi pendidikan.²⁰

Sementara dalam pandangan Hilda Taba, istilah kurikulum berkaitan erat dengan upaya dari sebuah institusi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum juga dimaknai sebagai seperangkat pengalaman dan proses pendisiplinan diri yang secara sengaja diberikan oleh lembaga pendidikan kepada peserta didiknya, sebagai bekal untuk berpikir dan bertindak.²¹ Sehingga istilah ini juga berhubungan erat dengan usaha proses pembelajaran dan pengembangan sesuai dengan target-target pencapaian.

Intinya, kurikulum di sini sangat penting kehadirannya. Bahkan mengingat Indonesia telah menjalankan amanat hak pendidikan bagi kaum disabilitas tanpa diskriminasi serta menjamin sistem pendidikan inklusi, maka implementasinya pun perlu diperhatikan dan diawasi secara ketat, agar sekolah reguler dapat memberikan layanan pendidikan yang layak bagi ABK. Adapun dari definisi di atas telah menunjukkan betapa kurikulum menempati posisi yang sangat krusial dalam pendidikan, sehingga rencana, isi dan pelaksanaan rencana merupakan bahan kajian yang harus ada dalam mencapai penyelenggaraan pendidikan nasional.²²

18 Bandi Delphi, Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus: Suatu Pengantar Dalam Pendidikan Inklusi, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2006), hlm. 14

19 Oemar Hamalik, Profesionalisasi Tenaga Pendidikan, (Bandung: Angkasa, 2006), hlm. 7.

20 Heni Listiana. Pengembangan Kurikulum. (Surabaya: Imtiyaz, 2016), hlm. iii.

21 Hilda Taba, Curriculum Development: Theory and Practice, (New York: Hartcourt, Brace & Wolrd, Inc, 1962), hlm. 9.

22 Lihat: Permendiknas Undang-Undang No. 20 tahun 2003 pasal 1 (ayat 19).

Meski demikian, kompetensi dari lulusan sekolah berbasis inklusi juga perlu mendapat perhatian yang serius agar peserta didik tetap bisa melanjutkan pendidikan dan karirnya dengan tanpa kendala. Kaitannya dengan hal ini pendidikan inklusi akan lebih ideal dengan *life skills* untuk memberikan berbagai keterampilan kepada siswa. Sehingga pendidikan inklusi dalam mewujudkan kecakapan hidup (*life skills*) dapat diintegrasikan ke dalam pengembangan kurikulum. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Taba dalam Arifin, bahwa salah satu titik fokus dari adanya analisis kurikulum adalah mencari tahu sejauh mana kecakapan hidup dan perihal bekerja bisa memberi dampak positif pada para peserta didik untuk menyelesaikan persoalan hidupnya yang kompleks.²³

Selain itu, Rusman juga menyatakan terkait makna dari pendidikan kecakapan hidup, yakni sebuah bentuk kecakapan yang bisa memberikan daya kepada peserta didik untuk melanjutkan hidup di eranya. Dengan pendidikan kecakapan hidup, peserta didik juga diajari bagaimana bertahan hidup ketika merasa tertekan, bagaimana cara menyelesaikan masalah dan mencari solusi terbaik untuk mengatasi problematika kehidupannya.²⁴

Dari dua definisi menurut Taba dan Rusman di atas, dapat dikatakan bahwa yang disebut dengan pendidikan kecakapan hidup pasti bisa memberikan setidaknya beberapa keterampilan pada peserta didik, baik dari segi pembelajaran maupun mengembangkan potensinya yang lain. Ketika keterampilan dalam belajar telah dikuasai oleh peserta didik, maka dipastikan keterampilan yang lain dari sebelum-sebelumnya akan lebih mudah dikuasai. Seperti halnya keterampilan mengembangkan ide dan gagasan untuk masa mendatang, dan lain sebagainya.²⁵ Oleh karena itu kita sadari bahwa anak yang mempunyai bakat spesial tidak dapat dipaksa untuk mengikuti pendidikan pada umumnya, akan tetapi mereka harus mendapatkan layanan pendidikan seperti pada umumnya. Maka dari itu seorang pendidik atau pengajar juga perlu memahami bagainya caranya merombak kurikulum dan

23 Zainal Arifin, *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2012), hlm. 238.

24 Rusman, *Manajemen Kurikulum*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 500.

25 Anwar, *Pendidikan Kecakapan Hidup Konsep dan Aplikasi*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hlm. 13

pendidik juga harus memiliki kreativitas dan inovasi yang selaras dengan kebutuhan peserta didik.

Meski begitu, kurangnya koordinasi dari berbagai pihak, ditambah manajemen pengelolaan yang belum optimal, membuat program pendidikan inklusi belum bisa sepenuhnya dilaksanakan. Ini dibuktikan pada tahap perkembangan, masih terdapat banyak sekolah-sekolah yang menjalankan program pendidikan secara serampangan, mulai dari pengelolaan sampai tahap pengawasan. Artinya, belum banyak yang dapat memegang peranannya sebagai pendidik yang memiliki SDM dengan kualitas yang baik. Selain itu sarana dan prasana juga belum mendukung adanya program inklusi di sebuah lembaga pendidikan, sehingga kualitas pendidikannya belum bisa dipertanggungjawabkan.²⁶

Eksistensi dari manajemen pendidikan sangat dibutuhkan dalam rangka mengembangkan secara bertahap model pendidikan inklusi ini. Manajemen tersebut harus sudah tertata sedemikian rupa, sehingga memberikan *output* berupa peserta didik yang sanggup bersaing dengan dunia luar untuk mendapatkan kesempatan baru yang lebih banyak, termasuk pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu dengan hadirnya manajemen pengelolaan yang baik pada peserta didik, pendidik dan lembaga secara umum, maka kedudukan ABK di tengah-tengah masyarakat setelah berhasil menempuh pendidikan tidak akan dipandang sebelah mata. Kesempatan mendapatkan pekerjaan yang layak juga akan terbuka lebar bagi ABK tersebut.²⁷

Manajemen sangat dibutuhkan dalam setiap jenis organisasi, tidak terkecuali dalam organisasi pendidikan. Ini karena manajemen dapat membantu lembaga mengelola dan atau mengatur jalannya proses pendidikan. Hal tersebut perlu diterapkan guna membuat organisasi pendidikan bisa segera mencapai tujuannya. Maka dalam proses pengelolaan, harus dipastikan dimulai dengan suatu rencana yang matang, agar bisa sampai pada tahapan berikutnya. Di sinilah letak semakin krusialnya posisi manajemen pendidikan.²⁸

Merujuk pada pemaknaan pendidikan dalam ajaran Islam, maka pendidikan tidak hanya dipahami sebagai suatu hak seseorang, akan tetapi pendidikan juga merupakan kewajiban yang harus ditunaikan

26 Ibid.,. hlm. 1.

27 Aldjon. dkk. Manajemen Pendidikan Inklusif. Jakarta: Depdiknas, Dirjen Pendidikan Tinggi, Direktorat Ketenagaan, 2007.

28 Sere Saghraie Daulay. Pengembangan Ilmu Manajemen Pendidikan. (Widyaiswara Madya Pusklat Industri, Tt), hlm. 3-4.

oleh seseorang, baik lewat pendidikan formal, maupun dengan mengambil pendidikan non-formal. Sehingga peneliti merasa harus melakukan penelitian secara mendalam terkait pendidikan inklusi. Lembaga pendidikan yang akan menjadi pusat penelitian peneliti adalah Sekolah Dasar Islam (SDI) Al-Azhaar yang bertempat di Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung dan di Sekolah Dasar (SD) Noble yang juga terletak di Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung. Peneliti fokus pada analisis kedua sekolah tersebut tentang bagaimana keduanya mengelola pendidikan inklusi. Program pendidikan inklusi di sini lebih menekankan pada pembahasan kebijakan, manajemen yang dijalankan, modifikasi dan konsep-konsep penguatan yang diambil guna mendukung penyesuaian peserta didik berkebutuhan khusus dengan sistem yang ada.²⁹

Kedua lembaga pendidikan ini memiliki perbedaan karakter. SDI Al-Azhaar merupakan sekolah berbasis Islam yang menekankan peserta didiknya memiliki wawasan keagamaan yang mendalam, selain juga tetap mengutamakan prestasi. SDI Al-Azhaar merupakan sekolah yang memberi ruang seluas-luasnya pada ABK untuk belajar bersama dengan anak-anak normal lainnya tanpa merasa dibedakan. Bahwa sebelumnya, karena mereka berbeda, seringkali mereka terabaikan dan kesulitan mencari tempat belajar.

Menurut Tuti Haryati selaku pelopor Program Inklusi di SDI Al-Azhaar, SDI Al-Azhaar hadir untuk melaksanakan program inklusi dengan mengutamakan program unggulan tentang keagamaan dan berpartisipasi dalam perlombaan keilmuan selalu diikuti.³⁰ Itulah sebabnya sekolah tersebut memiliki keistimewaan karena telah memberikan kesempatan penuh kepada anak-anak, utamanya anak-anak difabel untuk mendapatkan ruang belajar yang sama tanpa membeda-bedakan.

Memang bukan perkara mudah membuat konten atau materi kurikulum dan menjalankan sistem pendidikan berbasis inklusi, mengingat kebutuhan peserta didik tidaklah sama. Kebutuhan anak pun diperlukan lebih khusus untuk memberikan pemahaman mengenai pelajaran di kelas. Terlebih apabila sekolah menerapkan *fullday school*, mau tidak mau sekolah harus menyediakan guru pendamping khusus

29 Hasil wawancara dengan salah satu guru inklusif di SD Noble National Academy Kedungwaru Tulungagung, 17 Januari 2018.

30 Hasil Wawancara dengan salah satu guru inklusif di SDI Al-Azhaar Kedungwaru Tulungagung pada tanggal 17 Januari 2018

atau shadow teacher, agar pembelajaran dapat diterima dengan baik oleh anak-anak difabel. Sebab, guru kelas saja tidak akan mampu *menghandle* anak-anak secara keseluruhan apabila terdapat anak-anak difabel pula dalam kelasnya. Itulah mengapa guru pendamping khusus sangat diperlukan dalam jalannya pembelajaran pada sekolah inklusi.

Begitu juga yang ada di SD Noble *National Academy*. Di SD tersebut, pihak sekolah juga memberikan kesempatan yang sama bagi para penyandang disabilitas. Tujuan utama dari SD Noble juga sama yakni tidak adanya diskriminasi untuk pendidikan. Bahwa mereka memiliki hak dalam mendapatkan pendidikan yang sama dengan anak-anak normal lainnya. Sekolah ini juga adalah satu-satunya sekolah dasar dengan latar belakang non-muslim yang menerapkan program inklusi, yang tentunya di sekolah tersebut di dominasi oleh siswa non-muslim juga. Sekolah umum yang menurut peneliti patut dijadikan contoh dalam program pemerintah, yang mana sekolah yang berlatar belakang non-muslim saja mampu merasakan gejolak jiwa dari para kaum difabel dengan kualitas yang bagus dan pelayanan baik. Bahkan sekolah tersebut sangat memahami kebutuhan dan kondisi kaum difabel, seperti penyediaan jalan yang dapat dilewati oleh kursi roda, menurut peneliti itu adalah hal yang sangat sepele tapi membawa manfaat yang sangat besar.

Dari pernyataan-pernyataan tersebut, kiranya penting untuk diteliti secara lebih lanjut dan mendalam mengenai kesalingan yang terjadi antara anak-anak difabel dengan anak-anak normal dalam pelaksanaan pembelajaran. Manajemen yang langsung berkaitan dengan kurikulum harus berjalan secara optimal, agar tujuan dari pendidikan nasional juga lekas tercapai. Manajemen pengelolaan kurikulum serta implementasinya juga sebaiknya mendapatkan pengelolaan dan program yang tepat agar penyelenggaraan program pendidikan inklusi sesuai dengan program pemerintah yakni untuk mewujudkan pendidikan yang berkeadilan tanpa diskriminasi dan sesuai dengan cita-cita bangsa untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berkualitas sebagai kecakapan hidup.

Berangkat dari konteks penelitian di atas, peneliti melihat adanya kesamaan pada program pemerintah dalam menerapkan pendidikan inklusi. Dari sini kemudian peneliti memiliki ketertarikan melakukan penelitian dengan judul "**Manajemen Kurikulum Pendidikan Inklusi dalam Meningkatkan Kecakapan Hidup Peserta Didik**". Dengan pertimbangan sejumlah pihak yang tidak sedikit menemui berbagai

tantangan dalam upaya mewujudkan pendidikan inklusi. Banyaknya pendidik atau guru yang masih ragu untuk megaplikasikan program pendidikan inklusi, tidak hanya karena terkendala kemampuan yang terbatas, akan tetapi juga karena selama ini dalam prosesnya tidak diimbangi dengan peningkatan tehnik mengajar dan penambahan sarana dan prasarana yang memadai. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberi gambaran terkait serba-serbi pendidikan inklusi. Berdasarkan konteks penelitian juga dapat diuraikan fokus dan pertanyaan pada bagian selanjutnya.

B. Fokus Penelitian dan Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti akan fokus mengkaji tentang Manajemen Kurikulum Inklusi yang ada di dua sekolah di Tulungagung, yakni SDI Al-Azhaar dan SD Noble *National Academy*, dalam meningkatkan kecakapan hidup peserta didik. Adapun dari fokus tersebut, peneliti dapat menguraikannya ke dalam pertanyaan-pertanyaan penelitian guna menjadi acuan, sebagai berikut:

1. Bagaimana Desain Kurikulum Pendidikan Inklusi dalam Meningkatkan Kecakapan Hidup Peserta Didik yang ada di SDI Al-Azhaar dan SD Noble *National Academy* Kedungwaru Tulungagung?
2. Bagaimana Implementasi Kurikulum Pendidikan Inklusi dalam Meningkatkan Kecakapan Hidup Peserta Didik di SDI Al-Azhaar dan SD Noble *National Academy* Kedungwaru, Tulungagung?
3. Bagaimana Evaluasi Kurikulum Pendidikan Inklusi Dilakukan dalam Meningkatkan Kecakapan Hidup Peserta Didik di SDI Al-Azhaar dan SD Noble *National Academy* Kedungwaru, Tulungagung?
4. Bagaimana Implikasi Kurikulum Pendidikan Inklusi Diterapkan dalam Meningkatkan Kecakapan Hidup Peserta Didik di SDI Al-Azhaar dan SD Noble *National Academy* yang bertempat di Kedungwaru, Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian, ditarik beberapa tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan desain kurikulum yang ada di SDI Al-Azhaar dan SD Noble *National Academy* dalam meningkatkan kecakapan hidup peserta didik.

2. Mengetahui bentuk implementasi dari kurikulum pendidikan inklusi di SDI Al-Azhaar dan SD Noble *National Academy* dalam meningkatkan kecakapan hidup peserta didik.
3. Menganalisis hasil evaluasi kurikulum pendidikan inklusi yang dilakukan oleh SDI Al-Azhaar dan SD Noble *National Academy* dalam rangka meningkatkan kecakapan hidup peserta didik.
4. Mendeskripsikan implikasi kurikulum pendidikan inklusi dalam rangka meningkatkan kecakapan hidup peserta didik di SDI Al-Azhaar Tulungagung dan SD Noble *National Academy* yang ada di Kedungwaru, Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagaimana mestinya, sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran mengenai manajemen kurikulum bagi pembaharu kurikulum di sekolah umum atau reguler yang telah menerima anak atau peserta didik berkebutuhan khusus namun belum menerapkan manajemen kurikulum pendidikan inklusi. Dengan adanya program inklusi menjadikan tumbuh minat bagi sebuah lembaga lain dalam mengimplementasikan program tersebut yang mana masa depan peserta didik khususnya anak berkebutuhan khusus juga terfikirkan kemaslahatannya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengalaman dan pengetahuan baru mengenai seluk beluk pengelolaan dan pengembangan kurikulum pendidikan inklusi dalam meningkatkan keterampilan peserta didik.

b. Bagi Pendidik dan atau Calon Pendidik

Pada penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan tambahan sekaligus sumbangan pemikiran dari penulis mengenai seluruh rangkaian dan tahapan dalam pengembangan kurikulum pada pendidikan inklusi.

c. Bagi sekolah

Sebagai dorongan dalam meningkatkan manajemen kurikulum inklusi dengan maksimal sesuai dengan target capaian.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini diharapkan sebagai rujukan maupun kajian baru, utamanya terkait program pengembangan kurikulum inklusi serta memberikan informasi dan pijakan awal untuk melakukan penelitian selanjutnya.

E. Penegasan Istilah

1. Secara Konseptual

a. Manajemen Kurikulum

Istilah ini dibuat dengan tujuan untuk menyegerakan tujuan utama pengelolaan kurikulum. Adapun sistem pengelolaan kurikulum dilakukan dengan sistematis, kooperatif, sistemik dan komprehensif.³¹

b. Desain Kurikulum

Desain kurikulum merupakan pola yang dirancang sesuai dengan unsur-unsur atau komponen yang ada dalam sebuah kurikulum. Pola ini juga disesuaikan dengan struktur disiplin sebuah ilmu pengetahuan dalam rangka untuk mengembangkan intelektualitas peserta didik.³²

c. Pendidikan Inklusi

Pendidikan inklusi sendiri adalah istilah yang khusus disematkan pada sekolah yang mampu mengakomodasi seluruh peserta didiknya, tanpa memandang kondisi-kondisi di luar proses pembelajaran, seperti fisik, kecerdasan, sosial dan kebahasaannya dan lain-lain. Sehingga pendidikan ini sudah seharusnya menerapkan konsistensi program pendidikan bagi anak-anak difabel maupun anak-anak jalanan sekalipun.³³

³¹ Rusman, *Manajemen Kurikulum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 3

³² Nana S. Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum:Teori dan Praktek*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 113.

³³ Tarmansyah, "Pelaksanaan Pendidikan Inklusif di Sd Negeri 03 Alai Padang Utara Kota Padang", Volume IX No.1, edisi April 2009, hlm.2.

d. Life Skill Peserta Didik

Kecakapan hidup atau keterampilan merupakan hal positif diperlukan dalam menghadapi tantangan dan tuntutan dalam kehidupan. Istilah kecakapan hidup juga berarti sebuah kemampuan yang ada pada diri seseorang, untuk menyelesaikan persoalan hidupnya dengan berani, mengatasi rasa terpuruk dengan proses adaptasi yang kreatif dan aktif. Kecakapan hidup di sini sangat berbeda dari sekadar keterampilan bekerja, karena kecakapan hidup menitikberatkan pada kecakapan seseorang secara individu, sosial, akademik dan menyangkut vokasional. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa dalam ruang pendidikan, kecakapan hidup dimaknai sebagai satu kemampuan yang menjadi bekal seseorang dalam menjalani kehidupan secara siap dan berani.

2. Secara Operasional

Disertasi dengan judul, “Manajemen Kurikulum Pendidikan Inklusi dalam Meningkatkan Kecakapan Hidup Peserta Didik” ini, diwujudkan dengan kajian pengelolaan kurikulum dan desain kurikulum yang sudah ada pada kelas reguler pada lembaga pendidikan tingkat dasar menerapkan penerimaan ABK untuk melakukan proses pembelajaran dalam satu kelas reguler, guna meningkatkan *Life Skill* sebagai pembekalan diri yang mereka perlukan dalam masyarakat.

Kurikulum inklusi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah kurikulum dari sekolah umum atau reguler yang didesain sedemikian rupa agar mampu disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak, utamanya anak-anak difabel. Berdasarkan apa yang ada dalam kurikulum nasional, setidaknya ada tiga model. 1) model kurikulum reguler atau sekolah umum. 2) model kurikulum reguler yang menggunakan pengembangan. 3) model Program Pembelajaran Individual (PPI). Di sini, peneliti akan menggambarkan tahapan atau langkah-langkah pengelolaan kurikulum yang biasanya dimulai dari kegiatan perencanaan kurikulum, pelaksanaan dan penilaian. Adanya manajemen kurikulum dalam pendidikan inklusi yang berasal dari dari sekolah berbeda, diharapkan dapat memberikan implikasi dalam meningkatkan kecakapan hidup peserta didik.

Di lain hal, mengingat di dalam masing-masing kelas inklusi terdapat perbedaan dalam implementasi kurikulum, maka para pendidik juga harus mengejar kompetensi yang kurang dan mengajar sesuai dengan tujuan ditetapkan kelas inklusi, sehingga tujuan dari pendidikan sendiri bisa terlaksana secara efisien dan efektif. Selain itu peningkatan kecakapan hidup peserta didik juga harus didesain dengan perencanaan, pelaksanaan, penilaian, serta implikasi yang memadai.